

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 – 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jl. Raung No. 12 Sumenep ☎ (0328) 661199 , Fax (0328) 661100  
email : kab.sumenepbbpd@yahoo.com  
**SUMENEP**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Sumenep, serta berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 menindaklanjuti revisi yang dilakukan pula pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Provinsi Jawa Timur, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Sumene melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Sumenep, Juni 2018

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

**Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19710125 199503 1 001

---

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>4</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	4
2.2 Sumber Daya BPBD .....	9
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) .....	10
2.2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana .....	11
2.2.3 Kegiatan Operasional .....	13
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Sumenep .....	15
2.4 Akuntabilitas Keuangan .....	16
2.4.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 .....	16
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Sumenep .....	23
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..</b>	<b>27</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....	27
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih .....	28
3.3 Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Propinsi Jawa Timur .....	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	30
3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat .....	31

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	32
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....	34
4.2 Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana ....	35
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>38</b>
5.1 Strategi .....	38
5.2 Kebijakan.....	38
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>39</b>
6.1 Rencana Program .....	39
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>44</b>

---

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1	Susunan PNS BPBD Kabupaten Sumenep Berdasarkan tingkat pendidikan ..... 10
Tabel 2.2	Susunan karyawan berdasarkan unit pelayanan BPBD Kabupaten Sumenep ..... 10
Tabel 2.3	Data Eselonering Pegawai / Jabatan ..... 11
Tabel 2.4	Daftar asset Prasarana dan Sarana pada BPBD Kabupaten Sumenep Tahun 2015 ..... 11
Tabel 2.5	Data Pengadaan Transportasi menurut jenisnya ..... 12
Tabel 2.6	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan BPBD Kabupaten Sumenep ..... 26
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Sumenep ..... 35
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif ..... 40
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ..... 43

## BAB I P E N D A H U L U A N

### 1.1 LATAR BELAKANG

Secara hierarkhi tahapan proses penyusunan rencana pembangunan yang ada di daerah secara berjenjang adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Resntra – BPBD), dan Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) atau RKT - SKPD.

Tahapan berjenjang adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), ***Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – BPBD)***, dan Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) atau RKT - SKPD.

Tahapan berjenjang proses penyusunan rencana pembangunan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan, bahwa Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Karena kegiatan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari kebijakan Pembangunan Nasional, yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang berkeadilan, maka kebijakan dan program pembangunan yang ada di Kabupaten Sumenep harus terintegrasi dengan kebijakan Pembangunan Nasional, sehingga mampu menjamin kesesuaian pelaksanaan pembangunan, baik antar daerah/wilayah maupun antar sektor.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Perencanaan Strategis BPBD Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor xx Tahun 20xx tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2005 – 2025.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Sumenep 2016 - 2021 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana strategis BPBD, Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah pembangunan di sektor dampak penanggulangan bencana di Kabupaten Sumenep selama 5 (lima) tahun kedepan
2. Membantu memberikan dukungan sepenuhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Sumenep yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan rentan bencana di setiap daerah terpencil maupun di kepulauan, yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai;
4. Sebagai dasar/pijakan penyusunan Renja/RKT dan RKA – SKPD BPBD Kabupaten Sumenep.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

- BAB I     PENDAHULUAN
- BAB II    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III   PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
          PENDANAAN
- BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII  PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

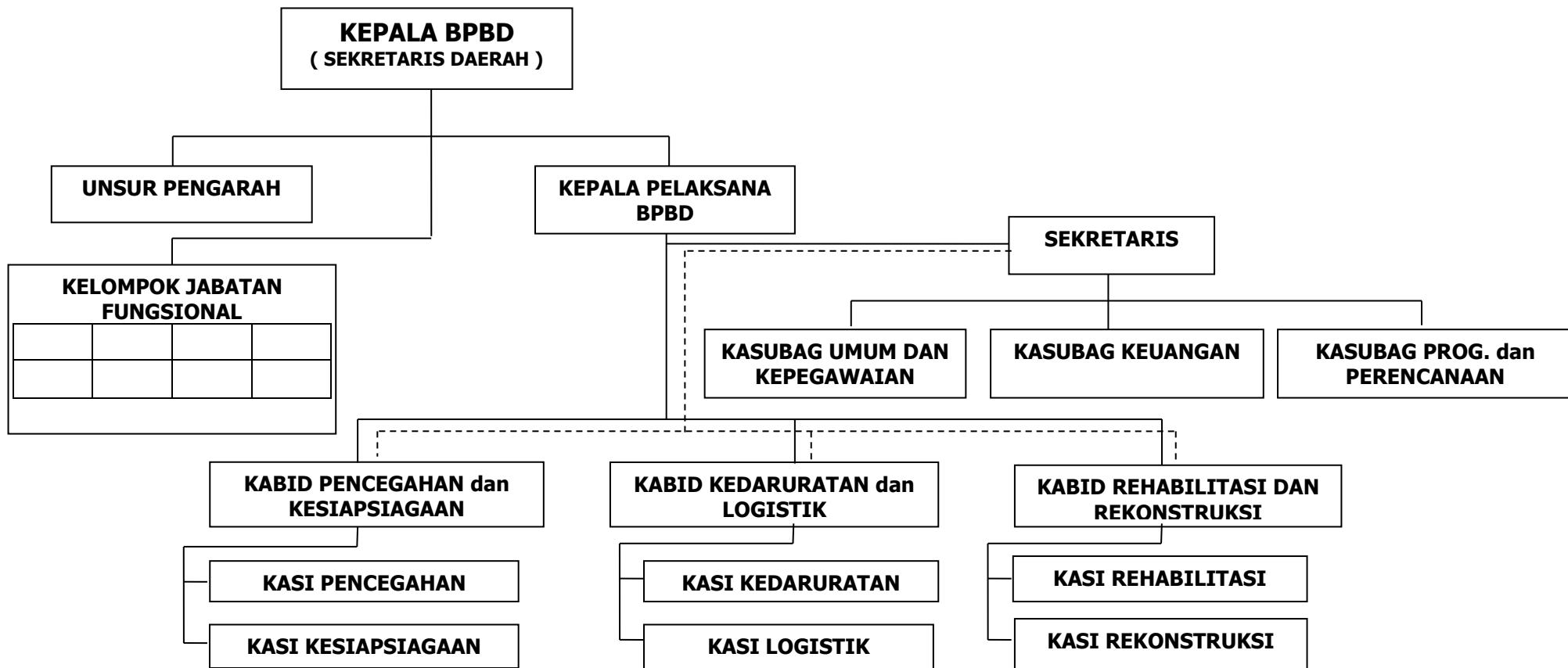
Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPBD berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD Kab. Sumenep mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang BPBD
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang BPBD ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang BPBD
- d. Pengelolaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, BPBD Kabupaten Sumenep memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

### STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN SUMENEP



— = GARIS KOMANDO  
- - - = GARIS KOORDINASI

Uraian tugas sesuai dengan struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala BPBD**

Kepala BPBD mempunyai tugas Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kebencanaan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sebagian tugas – tugas bupati di bidang BPBD
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang BPBD.
- c. Memberikan kecepatan, ketepatan dalam pelaksanaan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana.
- d. Mengelola urusan ketatausahaan dinas.
- e. Melaksanakan penegakan hukum di bidang BPBD.

### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas yang meliputi penyusunan program, umum, dan keuangan BPBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kesekretarian mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis operasional Bidang Sekretariat :
  - 1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1.1, Sekretariat mempunyai fungsi :
    - Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat ;
    - Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan ;
    - Pengelolaan menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta kedudukan hukum kegiatan ;

- Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ;
  - Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya ;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:
- 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
    - a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada Pra-Bencana serta Pengurangan Resiko Bencana (PRB);
    - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pemadam Kebakaran (PMK) serta Pencarian dan Pertolongan (SAR).
  - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2.1, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai fungsi :
    - Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada Pra-Bencana serta Pengurangan Resiko Bencana (PRB) ;
    - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada Pra-Bencana serta Pengurangan Resiko Bencana (PRB) ;
    - Pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada Pra-Bencana serta Pengurangan Resiko Bencana (PRB) ;

- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada Pra-Bencana serta Pengurangan Resiko Bencana (PRB) ;
  - Perumusan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemadam Kebakaran (PMK) ;
  - Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pencarian dan Pertolongan (SAR) ;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Merumuskan kebijakan teknis operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik :
- 1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada Saat Tanggap Darurat dan dukungan logistik.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3.1, Bidang Kedaruratan dan Logistik, mempunyai fungsi :
    - Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada Saat Tanggap Darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
    - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada Saat Tanggap Darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
    - Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada Saat Tanggap Darurat ;
    - Pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada Saat Tanggap Darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
    - Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada Saat Tanggap Darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Merumuskan kebijakan teknis operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
- 1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengurangan bencana pada Pasca-Bencana.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 4.1, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai fungsi :
    - Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada Pasca-Bencana ;
    - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada Pasca-Bencana ;
    - Pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada Pasca-Bencana ;
    - Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada Pasca-Bencana ;
    - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sumber Daya BPBD**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pelayanan serta unit usaha yang masih operasional. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah seluruh karyawan BPBD Kabupaten Sumenep per akhir tahun 2015 sebanyak 33 orang. Berikut ini Susunan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah per akhir tahun 2015 disusun berdasarkan tingkat pendidikan dan kualifikasi teknis pegawai.

Tabel 2.1

Susunan PNS BPBD Kabupaten Sumenep Berdasarkan tingkat pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Ket
1	S-2	5	
2	S-1	9	
3	D-IV	-	
3	D-III	-	
5	D-II PKB	-	
6	SLTA/SMU	17	
7	SLTP - SD	2	
	<b>JUMLAH</b>	<b>33</b>	

Sumber : Data Pegawai BPBD Tahun 2015

Tabel 2.2

Susunan karyawan berdasarkan unit pelayanan BPBD Kabupaten Sumenep

No	Unit Kerja	PNS	Tenaga Outsourcing	Tenaga Teknis
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33	16	-
2	Pusdalops	-	-	16
3	Relawan	-	-	50
4	Kedaruratan	-	-	12
	<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>78</b>

Sumber : Data Pegawai BPBD Tahun 2015

Tabel 2.3  
Data Eselonering Pegawai / Jabatan

NO	Eselon	Jumlah	Ket
1	Eselon II	1	
2	Eselon III	4	
3	Eselon IV	9	
	<b>JUMLAH</b>		

Sumber : Data Pegawai BPBD Tahun 2015

### 2.2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja BPBD baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan kebencanaan. Potensi dan kondisi BPBD Kabupaten Sumenep beserta sarana pendukungnya meliputi :

- a. Tanah, Gedung Kantor, Bangunan Lainnya termasuk fasilitas dan Kendaraan bermotor sebagai penunjang operasional pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Sumenep di lapangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4  
Daftar asset Prasarana dan Sarana pada BPBD  
Kabupaten Sumenep Tahun 2015

No	Milik BPBD	Luas/ Jumlah	Keterangan
	Tanah	1000.m2	Aset Pemkab. Sumenep
	Bangunan Kantor	525 .M2	Aset Pemkab. Sumenep
	Roda 4 mini bus	3	Operasional Kantor
	Truk ,	4	Operasional kegiatan BPBD
	Pickup	1	Operasional kegiatan BPBD
	Mobil Resque	1	Operasional kegiatan BPBD
	Sepeda Motor roda 2	13	Operasional kegiatan BPBD
	Sepeda Motor roda 3	-	Operasional kegiatan BPBD
	Komputer PC	12	
	Laptop	5	
	Mesin Ketik	2	
	Handy Talky	2	
	Rig	1	
	Pesawat Telpon	1	
	Faximile	1	

	Sofa	2	
	Kursi Pejabat	14	
	Meja	66	
	Kursi	96	
	Lemari Berkas	12	
	Perahu Karet	1	Operasional kegiatan BPBD
	Mesin Perahu Karet	1	Operasional kegiatan BPBD
	Speedboat	1	Operasional kegiatan BPBD
	Tenda Posko	1	
	Tenda Pengungsi	3	
	Tenda Keluarga	12	
	Lampu Penerangan	5	
	Solar Handle Lamp	12	
	Velbed	25	
	Lampu senter HID Search Light	1	
	Genset 5.5 KVA	1	
	Water Treatment Portable + Mesin	1	
	SSB	1	
	HT	2	

Sumber : BPBD Tahun 2015

b. Kelengkapan Fasilitas Transportasi

Kelengkapan pengadaan mobil truk dapur, truk tangki air, perahu karet, truk serbaguna dan mobil pick up untuk kelancaran pelaksanaan tugas kebencanaan.

Tabel 2.5  
Data Pengadaan Transportasi menurut jenisnya

NO	Thn	Mobil Truk dapur	Mobil Truk Tangki air	Perahu Karet	Mobil Truk Serbagun a	Mobil Pick up	Lainnya
1	2011						
2	2012						
3	2013	1		1	1		
4	2014		2			1	
5	2015			1			
	Jmlh						

Sumber : BPBD Tahun 2015

### 2.2.3 Kegiatan Operasional

operasional pada BPBD Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

#### 1. Penanggulangan Kejadian Bencana Alam

Bencana yang sering terjadi dengan frekuensi yang berpotensi bahaya tergolong **TINGGI** di Kabupaten Sumenep adalah, sebagai berikut :

- a. Cuaca Ekstrim berupa Angin Puting Beliung yang setiap tahun selalu melanda Kabupaten Sumenep di saat memasuki Musim Penghujan . Hal ini disebabkan oleh letak geografis Kabupaten Sumenep yang dikelilingi oleh lautan serta kurangnya penghijauan di beberapa tempat, seperti di daerah Pinggir Papas dan Karang anyar Kecamatan Kalianget serta daerah lainnya yang tandus ;
- b. Kekeringan yang setiap tahun terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Sumenep di saat memasuki Musim Kemarau. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Kabupaten Sumenep sebagian daratan pegunungan dan daerahnya yang tandus serta merupakan daerah tadah hujan ;
- c. Gelombang Ekstrim dan Abrasi yang setiap tahun sering terjadi kecelakaan laut. Hal ini disebabkan Kabupaten Sumenep merupakan daerah kepulauan.

Sedangkan bencana dan aneka kejadian dengan frekuensi yang berpotensi bahaya tergolong **SEDANG** seperti Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran yang sering terjadi setiap tahun pada setiap pergantian musim. Bencana dengan frekuensi yang berpotensi bahaya tergolong **RENDAH** seperti Epidemii dan Wabah Penyakit, Gempa Bumi, Kegagalan Teknologi Tsunami dan Konflik Sosial yang terjadi setiap saat/waktu.

Berikut kejadian Bencana yang terjadi selama Tahun 2015, sebagai berikut :

- a. Angin Puting Beliung : 5 Kali ;
- b. Angin Kencang disertai hujan : 87 Kali ;
- c. Tanah Longsor : 1 Kali ;
- d. Kebakaran : 40 Kali ;
- e. Kecelakaan Laut : 14 Kali ;
- f. Sambaran Petir : 6 Kali ;
- g. Ledakan Tabung Gas : 2 Kali ;
- h. Kesetrum Listrik/Arus Pendek : 1 Kali ;
- i. Kekeringan : 11 Kecamatan.

Jumlah korban jiwa akibat dari kejadian bencana tersebut :

- a. Meninggal : 18 Jiwa ;
- b. Luka Parah : 17 Jiwa ;
- c. Luka Sedang : 2 Jiwa ;
- d. Luka Ringan : 4 Jiwa.
- e. Rumah
  - Rusak Total : 68 Buah ;
  - Rusak Berat : 76 Buah ;
  - Rusak Sedang : 43 Buah ;
  - Rusak Ringan : 24 Buah.
- f. Fasilitas Umum :
  - Sarana Ibadah (Masjid/Mushollah) : 6 buah ;
  - Sarana Pendidikan (Sekolah) : 5 buah ;
  - Sarana Tempat Usaha : 3 buah ;
  - Sarana Transportasi (Perahu) : 16 buah.

Taksiran Kerugian material akibat terjadinya bencana mencapai sebesar Rp. 5.595.000.000,- (*Lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah*).

Penanggulangan Bencana yang terjadi meliputi kegiatan :

- a. Melakukan gotong royong bersama masyarakat ;
- b. Memberikan bantuan uang stimulan dan paket sembako kepada masyarakat korban bencana ;

- c. Melakukan evakuasi terhadap korban bencana ;
- d. Melakukan mitigasi struktural/penguatan tebing dengan melakukan pembangunan bronjong ;
- e. Melakukan pendistribusian air bersih/air minum melalui pengiriman tangki air ;
- f. Membangun Pipanisasi untuk mengurangi dampak kekeringan ;
- g. Melakukan pemadaman bekerja sama dengan KKP ;
- h. Pencegahan bencana antara lain sosialisasi kepada warga di sekitar daerah rawan bencana untuk ikut menjaga lingkungan sehingga dapat mengurangi ancaman bencana ;
- i. Memberikan bimbingan teknis fasilitator edukasi bagi guru dalam penanggulangan bencana ;
- j. Sosialisasi tentang kebijakan Pemerintah dalam menghadapi bencana kepada kelompok masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat/agama/profesi untuk meminimalkan korban akibat bencana ;
- k. Mempersiapkan sarana dan prasarana apabila terjadi bencana, misalnya : tenda, dapur umum, perahu karet, tempat evakuasi dan lain-lain ;
- l. Tanggap darurat antara lain penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan medis dan obat-obatan, bantuan sandang pangan dan pemulihan sarana dan prasarana ;  
Rehabilitasi antara lain perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai.

### **2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Sumenep**

BPBD telah membawa perubahan yang positif dalam hal pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Berbagai persoalan seperti kurang tersedianya sarana transportasi dan komunikasi, serta kurangnya sumber daya manusia di bidang kebencanaan. Pada sisi input dapat ditemukan beberapa persoalan. Pertama, persoalan SDM bidang rentan bencana, baik jumlah dan kualifikasi teknis pendidikan masih kurang bila dibandingkan terhadap jumlah seluruh pegawai/tenaga pada BPBD Kabupaten Sumenep.

Kedua ketersediaan sarana dan prasarana diantaranya yaitu bantuan Logistik yang tetap, dibebani oleh kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya, sehingga menjadikan keharusan pengendaliannya.

Keterbatasan anggaran biaya untuk urusan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sumenep belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan atau program rentan bencana, sehingga masih membutuhkan bantuan dari sumber dana lainnya baik anggaran dari pemerintah pusat dan atau pemerintah propinsi demi mencapai target SPM.

## **2.4 Akuntabilitas Keuangan**

Secara Umum BPBD telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penanggulangan bencana baik yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka perwujudan *good governance*.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah pencapaian penetapan target kinerja secara optimal. Pada pengukuran kinerja kali ini secara umum kami menfokuskan pada pengukuran indikator output dan indikator outcome.

### **2.4.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan empat belas kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat (100%):
  - Alokasi : Rp. 2.724.000,00
  - Realisasi : Rp. 2.724.000,00
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik :
  - Alokasi : Rp. 78.000.000,00
  - Realisasi : Rp. 52.972.976,00
- c. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (100%) :
  - Alokasi : Rp. 34.100.000,00
  - Realisasi : Rp. 34.100.000,00

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (100%) :
  - Alokasi : Rp. 50.900.000,00
  - Realisasi : Rp. 50.900.000,00
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (100%) :
  - Alokasi : Rp. 8.236.300,00
  - Realisasi : Rp. 8.236.300,00
- f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (100%) :
  - Alokasi : Rp. 23.880.400,00
  - Realisasi : Rp. 23.880.400,00
- g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%) :
  - Alokasi : Rp. 21.528.000,00
  - Realisasi : Rp. 21.528.000,00
- h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%) :
  - Alokasi : Rp. 19.400.000,00
  - Realisasi : Rp. 19.400.000,00
- i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (100%) :
  - Alokasi : Rp. 40.000.000,00
  - Realisasi : Rp. 40.000.000,00
- j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (100%) :
  - Alokasi : Rp. 36.216.000,00
  - Realisasi : Rp. 36.216.000,00
- k. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (100%) :
  - Alokasi : Rp. 101.050.000,00
  - Realisasi : Rp. 101.050.000,00
- l. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (100%):
  - Alokasi : Rp. 6.665.000,00
  - Realisasi : Rp. 6.665.000,00
- m. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (100%) :
  - Alokasi : Rp. 120.900.000,00
  - Realisasi : Rp. 120.800.000,00

n. Kegiatan Pameran Pembangunan (100%) :

- Alokasi : Rp. 20.000.000,00
- Realisasi : Rp. 20.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan enam kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pengadaan Komputer :

- Alokasi : Rp. 13.500.000,00
- Realisasi : Rp. 12.937.800,00

b. Kegiatan Pengadaan Penghias Rumah Tangga (100%) :

- Alokasi : Rp. 3.000.000,00
- Realisasi : Rp. 3.000.000,00

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (100%) :

- Alokasi : Rp. 33.000.000,00
- Realisasi : Rp. 33.000.000,00

d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (100%) :

- Alokasi : Rp. 81.298.400,00
- Realisasi : Rp. 81.298.400,00

e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer (100%) :

- Alokasi Alokasi : Rp. 14.400.000,00
- Realisasi : Rp. 14.400.000,00

f. Kegiatan Pembangunan Tempat Parkir (100%) :

- Alokasi : Rp. 40.000.000,00
- Realisasi : Rp. 40.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan satu kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Formal (99%):

- Alokasi : Rp. 10.000.000,00
- Realisasi : Rp. 9.900.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan satu kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (100%) :
  - Alokasi : Rp. 2.480.000,00
  - Realisasi : Rp. 2.480.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dengan enam kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana bagi Relawan :
  - Alokasi : Rp. 99.115.000,00
  - Realisasi : Rp. 98.715.000,00
- b. Kegiatan Pengambilan dan Pendistribusian Buffer Stock dan Peralatan bagi Korban Bencana :
  - Alokasi : Rp. 74.950.000,00
  - Realisasi : Rp. 74.910.000,00
- c. Kegiatan Operasional Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) :
  - Alokasi : Rp. 106.900.000,00
  - Realisasi : Rp. 106.700.000,00
- d. Kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Edukasi Penanggulangan Bencana (100%) :
  - Alokasi : Rp. 110.593.000,00
  - Realisasi : Rp. 110.593.000,00
- e. Kegiatan Pendistribusian Air Bersih untuk Daerah Kekeringan :
  - Alokasi : Rp. 21.848.000,00
  - Realisasi : Rp. 8.000.000,00
- f. Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Daerah Rawan Bencana :
  - Alokasi : Rp. 90.000.000,00
  - Realisasi : Rp. 89.450.000,00

Program Pemantauan Potensi Dini Bencana Alam dengan satu kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam :
  - Alokasi : Rp. 71.270.500,00
  - Realisasi : Rp. 70.870.500,00

Program Pengerahan dan Pengoperasian Sistem Komando Tanggap Darurat dengan dua kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Rapat Koordinasi TRC dan Temu Relawan Penanggulangan Bencana :
  - Alokasi : Rp. 158.312.000,00
  - Realisasi : Rp. 158.002.000,00
- b. Kegiatan Penanganan Darurat Bencana (100%) :
  - Alokasi : Rp. 70.250.000,00
  - Realisasi : Rp. 70.250.000,00

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan satu kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial (100%) :
  - Alokasi : Rp. 90.000.000,00
  - Realisasi : Rp. 90.000.000,00

Dari data tersebut nampak bahwa pengukuran kinerja BPBD untuk sektor penanggulangan bencana mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara optimal disisi lain kinerja dampak kekeringan mengalami stagnasi, penurunan hal ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana dalam menangani bencana.

Dari sisi anggaran dan realisasi baik pendapatan maupun belanja total anggaran pendapatan maupun realisasinya sejak tahun 2015 BPBD

Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan seperti dalam tabel dibawah ini

:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGAR AN (Rp)	PROSE N TASE
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.749.860.392</b>	<b>3.684.158.240</b>	<b>65.702.152</b>	<b>98,25</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.095.343.792</b>	<b>2.071.180.864</b>	<b>24.162.928</b>	<b>98,83</b>
2.1.1	Gaji dan Tunjangan	1.883.843.792	1.869.855.114	13.988.678	99,26
2.1.2	Tambahan Penghasilan PNS	211.500.000	201.323.750	10.176.250	95,19
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.654.516.600</b>	<b>1.612.979.376</b>	<b>41.537.224</b>	<b>97,49</b>
2.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	563.599.700	538.472.676	25.127.024	95,54
2.2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	185.198.400	184.636.200	562.200	99,70
2.2.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.000.000	9.900.000	100.000	99,00
2.2.4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.480.000	2.480.000	0	100

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)	PROSEN TASE
2.2.5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	503.406.000	488.368.000	15.038.000	97,01
2.2.6	Program Pemantauan Potensi Dini Bencana Alam	71.270.500	70.870.500	400.000	99,44
2.2.7	Program Pengerahan dan Pengoperasian Sistem Komando Tanggap Darurat	228.562.000	228.252.000	310.000	99,86
2.2.8	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	90.000.000	90.000.000	-	100

Disisi lain untuk belanja daerah BPBD Kabupaten Sumenep sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 memperlihatkan trend yang meningkat. Pada tahun 2012 Alokasi dana untuk BPBD Kabupaten Sumenep sebesar Rp 5.261.282.828, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.111.156.431, Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2013 anggaran meningkat menjadi Rp 3.843.263.756, dengan relisasi anggaran sebesar Rp 3.640.283.320 selanjutnya pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.4.615.376.246, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.538.657.381, pada tahun 2015 alokasi anggaran mengalami peningkatan menjadi Rp.3.749.860.392, dengan realisasi anggaran Rp. 3.684.158.240 .Dari sisi penganggaran tahun 2012 sampai dengan 2015 ( dari tahun anggaran 2012 ke tahun anggaran 2013 mengalami penurunan 27%, dari tahun 2013 ke tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan

20% dan dari tahun 2014 ke tahun anggaran 2015 mengalami penurunan 19% ) sehingga total penurunan anggaran 8.67% %, ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana.

## **2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Sumenep**

BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan BPBD Kabupaten Sumenep. Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.

Tantangan berikutnya adalah besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana maka banyak komunitas masyarakat yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah juga perlu diberi pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencana dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga belum terpenuhi secara ideal.

Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan terbitnya Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam

analisis SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

▪ **Lingkungan Internal**

**KEKUATAN (S)**

1. Tersedianya Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Diterbitkannya aturan-aturan turunan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta Peraturan-peraturan Kepala BNPB.
3. Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 berikut kewenangan yang dimilikinya;
4. Dukungan Bupati terhadap penanggulangan bencana dan kebakaran sangat besar;
5. Dimilikinya relawan satuan tugas penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
6. Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Sumenep.

**KELEMAHAN (W)**

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana;
2. Terdapat perbedaan aturan mengenai Dana Siap Pakai antara Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
6. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
7. Belum tersosialisasikan secara luas paradigma baru penanggulangan bencana;
8. Belum tersedianya dana kontigensi untuk penanggulangan bencana.
9. Belum maksimalnya ketersediaan dana operasional Pemadam Kebakaran (PMK) dan Search and Rescue (SAR).

▪ **Lingkungan Eksternal**

**PELUANG (O)**

1. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan kebencanaan;
3. Adanya dukungan dari lembaga/instansi pemerintahan yang terkait;
4. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
5. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.

**ANCAMAN (T)**

1. Kondisi alam dan sosial yang rawan terjadi bencana;
2. Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang yang mengakibatkan
3. Terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana;
4. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai paradigma penanggulangan bencana;
6. Jumlah penduduk dan luas wilayah yang cukup besar.

Alokasi anggaran untuk BPBD kabupaten tersaji pada table 2.6

Tabel 2.6 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan BPBD Kabupaten Sumenep

URAIAN	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH							
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>							
Hasil Pajak Daerah							
Hasil Retribusi Daerah							
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan							
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah							
<b>DANA PERIMBANGAN</b>							
.....							
<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>							
.....							
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.749.860.392</b>						
BELANJA TIDAK LANGSUNG	<b>2.095.343.792</b>						
Belanja Pegawai							
.....							
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.654.516.600</b>						
Belanja Pegawai							
Belanja Barang dan Jasa	1.399.491.576,00						
Belanja Modal	65.659.003,42						

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kapasitas kompetensi dan efektifitas serta kinerja belum sepenuhnya memadai karena pada umumnya masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sebesar 8%, dan untuk S1 dan S2 masih sebanyak 5%, selain itu kompetensi khusus/keahlian teknik yang dimiliki pegawai juga masih sangat terbatas.

#### **2. Masih terbatasnya sarana prasarana/fasilitas perkantoran termasuk bangunan fasilitas parkir Mobil Jumbo Tangki Air, mobil jumbo dapur makanan untuk pengungsi serta mobil Dinas lainnya dan khusus tempat Perahu karet yang masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas - tugas intern maupun ekstern BPBD.**

#### **3. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya aktifitas pertanian, bergesernya sebagian aktivitas masyarakat menjadi berbasis industri dan perdagangan serta makin prihatinnya atas kewaspadaan dampak bencana yang sering terjadi akhir-akhir ini menjadikan hal yang signifikan sehingga keberadaan eksistensi BPBD memang sangat dibutuhkan di masyarakat rentan bencana terutama di daerah pedesaan penduduk miskin dan di kepulauan. Oleh karenanya fasilitas kendaraan angkutan khusus Bencana seperti Mobil, Truk dan Motor demi kelancaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana agar cepat, tepat sasaran serta valid masih membutuhkan pengkajian ulang demi kelancaran kinerja terhadap masyarakat rentan bencana.**

Dengan perbandingan korelasi kelengkapan fasilitas Kendaraan roda empat dan roda dua yang tidak sebanding dengan besaran areal luas Kabupaten Sumenep agar mendukung kecepatan dan efektifitas kinerja terhadap dampak rentan bencana yang ada, maka jumlah kapasitas kendaraan serta khusus kendaraan laut yang minim dan teknologi pengadaan alat untuk mengetahui dampak cuaca ekstrem masih belum ada. Maka hal ini merupakan problem yang perlu cepat dipecahkan dan diselesaikan.

4. Banyaknya lokasi rawan bencana yang masih membutuhkan kapasitas tenaga manusia yang mana juga harus diimbangi pembagian areal tugas di masing-masing lokasi rawan bencana, dengannya sarana prasarana ada penunjangnya, sehingga kinerja pelayanan masing-masing unit rentan bencana dapat meningkatkan kualitas kinerja dampak bencana makin signifikan atau lebih optimal.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Memperhatikan visi Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep yaitu :

**“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”**

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 20xx – 20xx menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2016 - 2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi 4 Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”

Misi tersebut memiliki tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator tujuan Nilai SKM / Indeks RB. Sasaran RPJMD Kabupaten Sumenep pada Misi 4 adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut salah satu sasaran yang mendukung adalah sasaran pada urusan BPBD yaitu : “Meningkatnya penanganan korban bencana ”.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut diatas yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep telah menetapkan Tujuan dalam Renstra SKPD BPBD.

### **3.3 Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Propinsi Jawa Timur**

#### **Sasaran Renstra BNPB**

- 1) Terwujudnya kesadaran kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat dunia usaha) dalam upaya pengurangan resiko ( mitigasi) bencana struktural dan non struktural, penanggulangan bencana melalui koordinasi perencanaan program kegiatan peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah.
- 2) Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
- 3) Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan

Sedangkan sasaran umum yang ingin dicapai Badan Penanggulangan **Bencana Provinsi Jawa Timur** adalah :

- 1) Tumbuhnya budaya siaga bencana ditengah aparat dan masyarakat.
- 2) Terbitnya peraturan daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten / kota yang memadai bagi penyelenggaraan bencana.
- 3) Meningkatnya daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum.
- 4) Menurunnya derajat kerentanan pada kawasan rawan bencana.
- 5) Terhimpunnya sumber daya yang dapat dimobilisasi secara terpadu dalam upaya penanggulangan bencana.
- 6) Terselenggarakannya pertolongan yang cepat dan tepat sasaran pada setiap kejadian bencana.
- 7) Tersusunnya rencana pemulihan kawasan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 III- 28 bencana secara partisipatif.
- 8) Tersedianya standar kesejahteraan minimum korban bencana.
- 9) Pulihnya daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum.Meningkatnya jumlah dan kualitas pelayanan rentan dampak bencana terutama keselamatan terhadap masyarakat rentan bencana;

Apabila diperhatikan atas sasaran umum Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur tersebut, sasaran pada Urusan BPBD yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang existing maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

### **Kondisi ruang saat ini dan rencana pengembangan kawasan**

Kondisi tata ruang dan tata guna lahan di sekitar kawasan rentan bencana banjir, longsor, puting beliung dan kebakaran di Perkotaan, maupun di daerah terpencil akan berpengaruh terhadap pola kinerja yang nantinya apakah ; cepat efektif dan efisien serta valid jika terjadi kasus bencana antar kepulauan. Sehingga perlu adanya kesiapan segera agar aplikasi saat kejadian bencana terjadi tidak ada keterlambatan informasi apalagi penanganan yang terkena dampak bencana terhadap masyarakat setempat.

Untuk kawasan rentan dampak kekeringan masih perlu pengadaan transportasi mobil jumbo pengangkut air, karena masih banyak daerah terpencil kekurangan air bersih maupun air minum.

Sedangkan untuk kawasan rentan cuaca ekstrem seperti bahaya petir di daerah terbuka dan bahaya bias petir terhadap kabel listrik maupun pepohonan perlu adanya sosialisasi secara kontinuitas di daerah rentan bencana terhadap masyarakat setempat.

### **3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat**

Dalam rangka mencapai visi – misi maka Kabupaten Sumenep perlu menyusun faktor penghambat dan faktor pendorongnya sebagai berikut :

#### **Faktor Pendorong**

- a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran yang cukup memadai;
- b. Adanya Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, serta

tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan

- c. Adanya SPM, indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh SKPD dan peraturan perundang-undangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- d. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai;
- e. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan

#### **Faktor penghambat**

- a. Kualifikasi teknis Sumber Daya Manusia belum sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep termasuk beban kerja yang diemban;
- b. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta kelengkapan fasilitas rentan dampak bencana ;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan

### **3.6 Penentuan isu-isu strategis**

Berdasarkan Hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sumenep, Renstra BPBD Kabupaten Sumenep, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka Kabupaten Sumenep perlu menyusun faktor penghambat dan faktor pendorongnya sebagai berikut :

- 1) Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk indikator Sumber Daya Manusia (SDM) masih menunjukkan prosentase yang signifikan, hal ini diperjelas kembali dalam gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tabel 2.4 tentang data kualifikasi

teknis pegawai, disitu menunjukkan bahwa kompetensi pegawai masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah pegawai di masing-masing unit pelayanan.

- 2) Fasilitas sarana dan prasarana logistik yang harus terus tingkatkan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang berorientasikan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Masih terdapat unit pelayanan yang masih operasional harus diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana penunjangnya, agar mengoptimalkan kinerja pelayanan masing-masing unit pelayanan rentan bencana di masyarakat setempat.
- 4) Tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- 5) Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Sumenep di bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 17) dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sumenep

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Semakin meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan standar pelayanan publik, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Untuk itu diperlukan penetapan Tujuan sebagai cara pandang jauh ke depan tentang kemana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif dalam rangka mendukung capaian misi dan tujuan Bupati Sumenep.

Berdasarkan kondisi, potensi dan hasil kesepakatan stakeholders serta tujuan utama dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan memperhatikan misi ke 4 RPJMD Kabupaten Sumenep yaitu : Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel, maka tujuan yang ditetapkan adalah:

*Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah daerah*

Rumusan Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep berwawasan antara lain sebagai berikut :

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurun waktu 2016 – 2021
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi

- d. Memiliki orientasi ke masa depan
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep dan juga stake holders
- f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep.

## **SASARAN**

Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai tujuan yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, telah disusun pula Sasaran BPBD yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program BPBD ingin dicapai.

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep adalah (Dalam Renstra SKPD):

- Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat
- Terlaksananya penanganan bencana secara cepat, tepat, efektif, dan efisien
- Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi

### **4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Tujuan disusunnya Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep adalah untuk membangun sebuah Rencana Strategis sebagai pedoman dalam menyusun program dan indikator kinerja 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kedudukan, tugas dan wewenang yang

dilimpahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep.

Untuk mewujudkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai BPBD Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat
3. Terlaksananya penanganan bencana secara cepat, tepat, efektif, dan efisien
4. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran diatas tersaji dalam tabel 4.1

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Sumenep

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
1	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Prosentase kegiatan administrasi perkantoran yang terselenggara
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat	Prosentase tenaga penanggulangan bencana yang handal
		Terlaksananya penanganan bencana secara cepat, tepat, efektif, dan efisien	Prosentase penanganan bencana

		Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi	Prosentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi
--	--	---	---

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI**

Pada hakekatnya pelayanan bidang rentan dampak bencana yaitu mengedepankan faktor keselamatan, kualitas pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai penunjang pembangunan daerah Kabupaten Sumenep, Strategi pengembangan rentan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep meliputi :

- 1) Optimalisasi Manajemen Penanggulangan Bencana; dan
- 2) Membangun Manajemen Operasional dan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan Arah Kebijakan Melaksanakan Manajemen Operasional dan Sumber Daya Aparatur dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD.

#### **5.2 KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Sasaran dan Tujuan organisasi.

Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumenep adalah:

1. Meningkatkan kemampuan SDM penanganan bencana; dan
2. Melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program**

Penyusunan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Sumenep berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007.

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun rencana program dan kegiatan BPBD Kabupaten Sumenep untuk tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2015)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
							Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Target	Rp (000)	
							Tar Get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah	Nilai SKM	Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Prosentase kegiatan administrasi perkantoran yang terselenggara	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi, dengan kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  - Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor  - Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  - Penyediaan Makanan dan Minuman  - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi  - Peringatan Hari-Hari Besar  - Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah - Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan - Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor - Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 TA - Jumlah komponen instalasi yang diadakan  - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Jumlah tersedianya makanan dan minuman - Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi - Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan - Jumlah layanan perkantoran yang disediakan	90%	100%	840.246	100%	856.558	100%	734.195	100%	911.360	100%	1.002.496	100%	1.102.746	Kab. Sumenep
						1000 surat	1000 surat	2.724	1000 surat	2.544	1000 surat	2.544	1000 surat	2.798	1000 surat	3.078	1000 surat	3.386	
						12 bulan	12 bulan	78.000	12 bulan	65.850	12 bulan	83.400	12 bulan	91.740	12 bulan	100.914	12 bulan	111.005	
						17 jenis	17 jenis	8.236	13 jenis	7.377	13 jenis	7.377	13 jenis	8.114	13 jenis	8.926	13 jenis	9.818	
						36 jenis	36 jenis	44.986	32 jenis	41.639	32 jenis	41.639	32 jenis	45.802	32 jenis	50.383	32 jenis	55.421	
						15 jenis	15 jenis	9.400	8 jenis	20.320	6 jenis	17.570	8 jenis	19.327	8 jenis	21.259	8 jenis	23.385	
						16 jenis	16 jenis	33.200	17 jenis	31.200	12 jenis	31.200	15 jenis	34.320	15 jenis	37.752	15 jenis	41.527	
						2 jenis	2 jenis	35.292	2 jenis	34.896	2 jenis	34.896	2 jenis	38.385	2 jenis	42.224	2 jenis	46.446	
						100 kali	109 kali	136.000	122 kali	132.175	127 kali	128.816	127 kali	141.698	127 kali	155.686	127 kali	171.454	
						1 kali	1 kali	25.132	1 kali	25.000	2 kali	52.440	2 kali	57.864	2 kali	63.452	2 kali	69.797	
						16 org	16 orang	140.900	16 orang	155.700	16 orang	152.658	16 orang	167.924	16 orang	184.716	16 orang	203.188	

				- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Rumah Dinas - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli - Jumlah gedung kantor yang dipelihara - Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara - Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	- 3 unit 34 unit 6 unit	45 unit 3 unit 34 unit 6 unit	126.050 30.000 119.526 10.800	8 unit 3 unit 36 unit 6 unit	60.000 30.000 233.117 12.240	- 3 unit 35 unit 6 unit	- 25.000 139.914 12.240	15 unit 3 unit 24 unit 24 unit	103.745 27.500 153.905 18.414	15 unit 3 unit 24 unit 24 unit	114.119 30.250 169.296 20.255	15 unit 3 unit 24 unit 24 unit	125.531 33.275 186.226 22.280	
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :</b> - Pendidikan dan Pelatihan Formal  - Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian	<b>Prosentase pengembangan kompetensi pegawai</b> - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat / pelatihan / bimtek - Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	90% 3 org -	100% 3 orang -	10.000 10.000 -	100% 2 orang -	7.350 7.350 -	100% 2 orang -	7.500 7.500 -	100% 2 orang 5 paket	118.250 8.250 110.000	100% 3 orang 5 paket	130.075 9.075 121.000	100% 3 orang 5 paket	143.082 9.982 133.100	Kab. Sumenep
				<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan kegiatan :</b>  - Penyusunan Laporan Keuangan  - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	<b>Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu</b> - Jumlah laporan keuangan yang disusun - Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun - Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	90% 19 buku 8 buku -	100% 19 buku 8 buku -	53.380 50.900 2.480 -	100% 19 buku 8 buku -	56.370 53.890 2.480 -	100% 19 buku 8 buku -	56.370 53.890 2.480 -	100% 19 buku 8 buku 5 unit	180.000 65.000 40.000 75.000	100% 19 buku 8 buku 5 unit	198.000 71.500 44.000 82.500	100% 19 buku 8 buku 5 unit	217.800 78.650 48.400 90.750	Kab. Sumenep
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat	<b>Prosentase tenaga penanggulangan bencana yang handal</b>	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatan :</b>  - Peningkatan Kemampuan Satuan Search and Rescue	<b>Tersedianya tenaga penanggulangan bencana yang handal</b> - Jumlah satuan SAR BPBD	100% -	100% -	261.500 -	100% 30 orang	668.269 205.124	100% 30 orang	668.269 205.124	100% 30 orang	1.290.647 225.636	100% 30 orang	1.419.711 248.200	100% 30 orang	1.561.683 273.020	Kab. Sumenep

RENSTRA BPBD 2016 - 2021

				- Operasional SAR Speed Boat - Operasional Penanggulangan Bencana Kebakaran - Pemantauan dan Penyebar luasan Informasi Bencana Alam - Pembentukan Desa Tangguh Bencana	- Jumlah pelaksanaan operasi SAR Laut - Respon time / rata-rata waktu tanggap darurat pemadam kebakaran - Jumlah daerah yang dipantau dan jumlah penyebaran informasi bencana alam - Jumlah desa yang difasilitasi sebagai Destana	- - 14 lokasi -	- - 14 lokasi 1 desa	- - 15.705 78.014	- < 15 menit - 4 desa	- 314.975 - 148.170	- < 15 menit - 4 desa	- 314.975 - 148.170	25 kali < 15 menit 15 lokasi 6 desa	500.000 381.119 20.904 162.968	25 kali < 15 menit 20 lokasi 7 desa	550.000 419.231 22.994 179.285	25 kali < 15 menit 25 lokasi 8 desa	605.000 461.154 25.293 197.214	
		Terlaksananya penanganan bencana secara cepat, tepat, efektif, dan efisien	Prosentase penanganan bencana	<b>Program Kedaruratan dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik, dengan kegiatan :</b>  - Pengambilan, Pendistribusian dan Pengadaan Buffer Stock dan Peralatan Bagi Korban Bencana - Operasional Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	<b>Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar dalam tanggap darurat</b>  - Persentase penanganan masalah logistik bagi korban bencana - Jumlah tenaga PUSDALOPS yang terlatih	80% 80% 16 orang	80% 80% 16 orang	270.106 40.000 101.700	80% 80% 16 orang	145.400 50.000 95.400	80% 80% 16 orang	145.400 50.000 95.400	90% 90% 16 orang	220.440 115.500 104.940	90% 90% 16 orang	242.484 127.050 115.434	90% 90% 16 orang	266.732 139.755 126.977	Kab. Sumenep
		Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi	Prosentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dengan kegiatan :</b>  - Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam  - Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam / Sosial - Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Bencana	<b>Prosentase pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana</b> Jumlah bantuan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam Jumlah penanggulangan dan penyelesaian bencana Jumlah sarana dan prasarana pasca bencana pada masyarakat	80% - 10 lokasi -	80% - 10 lokasi -	105.999 - 105.999 -	80% - 10 lokasi -	90.000 - 90.000 -	80% - 10 lokasi -	90.000 - 90.000 -	90% 30 unit 10 lokasi 10 unit	949.000 450.000 99.000 400.000	90% 33 unit 10 lokasi 11 unit	1.043.900 495.000 108.900 440.000	90% 36 unit 10 lokasi 12 unit	1.148.290 544.500 119.790 484.000	Kab. Sumenep

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Adapun kegunaan dari indikator kinerja lebih kepada sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), pelaksanaan (*on-going*), maupun setelahnya (*ex-post*) dan sebagai petunjuk atas kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Indikator kinerja BPBD yang mengacu pada RPJMD tertuang dalam tabel berikut ini (7.1).

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

Sasaran RPJMD :Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Daerah ( tahun n-1 sd n-5)								
No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
			Tahun - 1	Tahun - 2	Tahun - 3	Tahun - 4	Tahun - 5	
1	Persentase penanganan daerah rawan bencana	65,75%	70,75%	73,75%	78,75%	85,75%	90,75%	94,75%

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Demikian Laporan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2021 Kabupaten Sumenep sedapatnya menjadikan acuan Kinerja yang bersinergi serta ber-Infrastruktur Lintas Sektor antar Dinas maupun Badan yang nantinya berkesinambungan .

Sumenep, Juni 2018

**KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN SUMENEP**

**Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19710125 199503 1 001